

AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM MANAJEMEN BENCANA TSUNAMI SELAT SUNDA

Budi Hasanah

*Program Studi Ilmu Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya
Jl. Raya Serang-Cilegon Km. 05 (Taman Drangong) Serang-Banten, Indonesia*

Email: budihasanah@gmail.com

Submitted: July 15, 2019, Reviewed: November 15, 2019, Published: November 19, 2019

ABSTRAK

Penerapan akuntabilitas dalam manajemen bencana menjadi faktor yang sangat penting dan merupakan salah satu bagian dari prinsip-prinsip *good governance*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas publik dalam manajemen bencana tsunami Selat Sunda. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui survei literatur. Teknik pengumpulan data melalui penelusuran sumber literatur yang berasal dari dokumen pemerintah, media, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik dalam manajemen bencana yang terjadi di selat sunda khususnya yang berdampak di pesisir Banten memperlihatkan kurang berjalan dengan baik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan yang serius sehingga diharapkan dampak bencana tidak memakan banyak korban serta proses evakuasi dan *recovery* korban baik fisik maupun nonfisik berjalan dengan optimal.

Kata Kunci: Akuntabilitas Publik, Manajemen Bencana, Tsunami Selat Sunda

ABSTRACT

The application of accountability in disaster management is a very important factor and is one part of the principles of good governance. This study aims to analyze how public accountability in the management of the Sunda Strait tsunami disaster. The research method used is a qualitative approach through literature surveys. Data collection techniques through the search for literary sources derived from government documents, media, books, and relevant journals. The results of this study indicate that public accountability in disaster management that occurs in the Sunda Strait, especially those that affect the coast of Banten, shows less well. This has become a challenge for serious evaluation and improvement so that it is expected that the impact of the disaster will not take many victims and the evacuation and recovery process of victims both physical and non-physical will run optimally.

Keywords: Public Accountability, Disaster Management, Sunda Strait Tsunami

PENDAHULUAN

Indonesia berduka. Sudah yang kesekian sepanjang tahun 2018 negara ini mengalami berbagai bencana khususnya bencana alam yang mengguncang Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah bencana di Indonesia sepanjang tahun 2018 terdapat 1.999

bencana dan tercatat pada bencana di perairan selat sunda pada akhir Desember 2018 lalu, jumlah korban meninggal dunia dan hilang akibat bencana merupakan jumlah paling besar apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. (Kompas.com, 25 Oktober 2018).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat potensi bencana

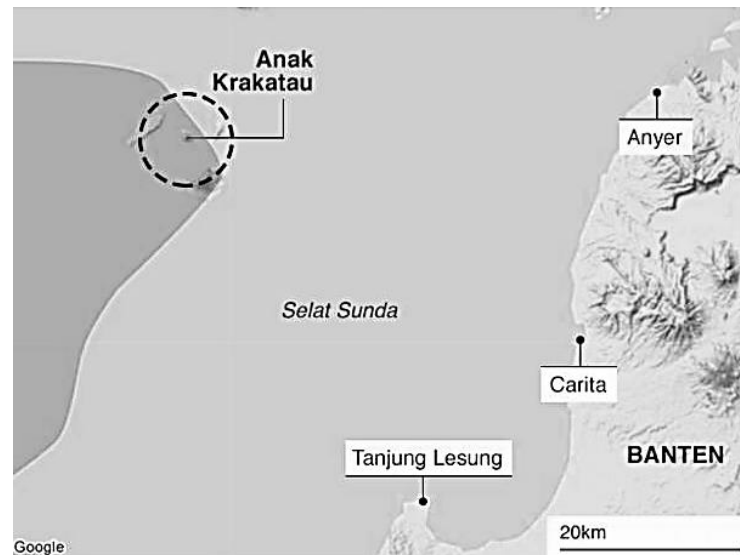
Vol.5, No.2, 2019
Doi: <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.22563>
<http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/index>

alam yang relatif tinggi. Hal ini disebabkan secara geologis, kepulauan Indonesia terletak pada jalur penunjaman lempeng bumi yang merupakan jalur penyebab gempa tektonik yang bersifat regional dan umumnya kerusakan yang ditimbulkan sangat parah. Kepulauan Indonesia dihuni deretan gunung api yang terbentang dari Sumatera, Jawa hingga Nusa Tenggara dimana sebagian besar adalah gunung yang aktif dan memiliki potensi dampak bencana gempa. Jalur gempa tersebut secara geologis berdampingan dengan jalur gempa bumi. Sebagian jalur gempa bumi tersebut berada di laut sehingga sangat

berpotensi menimbulkan bencana tsunami (Nur, 2010)

Pada hari mendekati pergantian tahun 2019, tepatnya pada hari sabtu malam tertanggal 22 Desember 2018, Indonesia digemparkan oleh Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi dimana hal ini berdampak tsunami di pesisir Perairan Banten dan Lampung. Bencana tersebut menghasilkan banyak korban khususnya masyarakat di pesisir Banten seperti di pesisir Anyer, Tanjung Lesung, Carita dan sekitarnya. Berikut gambar letak Gunung Anak Krakatau dan daerah yang berdampak tsunami di di sekitar pesisir Banten.

Gambar 1. Lokasi Gunung Anak Krakatau dan daerah yang berdampak tsunami selat sunda sekitar pesisir Banten



Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (per 27 Desember 2018)

Korban bencana tsunami Selat Sunda di pesisir Tanjung Lesung, Anyer, Carita dan sekitarnya mengisahkan situasi dan kondisi yang memilukan. Tidak hanya memakan korban yang meninggal dunia

tetapi banyak pula korban yang terluka serta hilang. Tidak hanya itu, secara psikologi berdampak traumatik bagi korban dan banyak rumah yang hilang karena terbawa air laut dan banyak juga rumah

Vol.5, No.2, 2019
Doi: <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.22563>
<http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/index>

yang rusak bahkan sampai hilangnya mata pencaharian warga setempat karena warga disana didominasi sebagai nelayan dimana peralatan dan perlengkapan nelayan mereka hilang dan rusak.

Data terakhir tertanggal 2 Januari 2019 menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dampak bencana ini memakan korban sebanyak 437 meninggal dunia, 1.459 orang luka dan 10 orang hilang. Tidak hanya itu, dampak tsunami hasil dari erupsi Gunung Anak Krakatau ini banyak warga yang akhirnya mengungsi akibat rumah mereka yang rusak. Sampai saat ini tercatat sebanyak 36.923 orang mengungsi dari tempat tinggalnya. Dari total tersebut hanya sekitar 10.000 orang yang mengungsi karena kehilangan rumah sedangkan sebagian besar lainnya mengungsi karena traumatik dengan tsunami (Tempo.co. 3 Januari 2019).

Melihat kenyataan tersebut dengan jumlah korban yang tidak sedikit membuat mata dan hati kita seakan berfikir sambil terenyuh. Berbagai pertanyaan yang terlontar mulai dari kaum intelektual sampai pada kaum awam terkait bencana tersebut. Bagaimana peran pemerintah mulai dari penanganan secara preventif, represif sampai dengan kuratif terhadap bencana tersebut. Padahal sudah jelas betul di dalam UU RI Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana bahwa NKRI bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk

perlindungan atas bencana. Begitupun peraturan devirat pada lingkup pemerintah daerah Banten dibahas pada Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Tetapi peraturan yang telah dibuat ini seakan tidak berfungsi dengan optimal sehingga kejadian bencana tersebut tidak ada peringatan sedikitpun bahwa akan timbul tsunami sehingga memakan banyak korban. Begitupun pada saat dan setelah bencana itu terjadi, pihak pemerintah pada proses evakuasi sampai pada proses pemulihan cukup lambat.

Oleh karena itu, berdasar penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Kurniawati, 2015) dimana dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa status bencana perlu ditetapkan berdasarkan definisi dan parameter yang jelas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2007. Sebagai tambahan, peningkatan fungsi dan wewenang BPBD dan pengadopsian standar atau praktik terbaik pengelolaan bantuan bencana juga perlu dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain itu, pada saat suatu kebijakan publik apapun dibuat dimanfaatkan oleh oknum pemerintah untuk meraup keuntungan pribadi dan golongan dengan melakukan tindakan korupsi anggaran bencana alam.

Kemudian penelitian yang sudah dilakukan oleh (Riawati, 2015) mengenai Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dalam prakteknya menjadi program yang ditunggangi oleh kepentingan politik praktis para elit-elit

pembuat kebijakan, baik dari lembaga Legislatif maupun lembaga Eksekutif. Salah satu faktor sebagai penyebab korupsi adalah aspek perundangan yang memberikan peluang bagi para aktor pembuat kebijakan untuk melanggengkan korupsi. Disini dengan melihat fakta setelah terjadinya tsunami selat sunda jelas bahwa peranan *good governance* khususnya pada prinsip akuntabilitas yang sejak dulu digaungkan kini dipertanyakan eksistensinya. Apakah sudah berjalan dengan semestinya atau pemerintah abai akan hal itu.

Good governance sebenarnya berkenaan dengan masalah bagaimana suatu organisasi ditata dan bagaimana tatanan tersebut berproses (Nugroho, 2004:222). Akan tetapi implementasi *good governance* pada manajemen bencana tsunami yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut kurang bekerja secara optimal. Artinya, apakah implementasi sudah sesuai dengan rencana dan apakah hasil yang diperoleh benar-benar bermanfaat bagi masyarakat (Nugroho, 2004:223). Sehingga menimbulkan hipotesis dimana hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh John Pierre dan B Guy Peters dalam Nugroho (2004:223) bahwa, “*governance was now increasingly defined not as the solution problems but instead as the very root and cause of the problems.*” Dengan begitu ukuran pokok dari *good governance* dapat difokuskan salah satunya mengenai akuntabilitas selain dari transparansi, *fairness* dan responsivitas.

Akuntabilitas merupakan refleksi dari pemerintah yang memiliki misi yang jelas dan menarik serta berfokus pada kebutuhan masyarakat (Henry, 2006). Sedangkan menurut (Asrini, 2017) dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal, dengan demikian akuntabilitas publik dapat memengaruhi peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Selain itu menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sa'adah, 2015) memaparkan butuh adanya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dimana hal ini juga dapat mewujudkan penyelenggaraan *good governance*.

Pada hakikatnya terdapat 3 (tiga) prinsip utama akuntabilitas: 1) merupakan garis kewenangan dan tanggung jawab atas tindakan yang diambil; 2) merupakan kewenangan yang dimiliki oleh rakyat untuk mengetahui bagaimana uang publik digunakan untuk kepentingan masyarakat; dan 3) apakah pejabat publik yang dipilih bertanggungjawab kepada rakyat atas keputusan-keputusan dan cara mereka menerapkan kebijakan dan program (Istianti, 2011:103). Dalam mengkaji akuntabilitas terdapat beberapa dimensi berikut beberapa pertanyaan kunci dari masing-masing dimensi tersebut yang

menarik. Seperti yang dipaparkan oleh (Aman, Al-shbail, & Mohammed, 2013):

Tabel 1. Dimensi dan pertanyaan kunci dari masing-masing dimensi akuntabilitas

No	Dimensi	Pertanyaan
1	Transparansi	Apakah organisasi mengungkapkan fakta-fakta tentang kinerjanya?
2	Pertanggung jawaban	Apakah organisasi menghadapi konsekuensi atas kinerjanya?
3	Pengendalian	Apakah organisasi melakukan apa yang diharapkan?
4	Tanggung jawab	Apakah organisasi mengikuti aturan yang berlaku?
5	Responsivitas	Apakah organisasi memenuhi harapan substansif yang disampaikan dalam bentuk kebutuhan dan permintaan?

Sumber: Aman, dkk (2013:17)

Penerapan akuntabilitas tersebut di dalam manajemen bencana tsunami dapat mengacu pada studi yang terkait penanggulangan bencana menurut (Moe & Pathranarakul, 2006). Berdasarkan waktu, peristiwa bencana dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bagian sebelum, saat dan sesudah. Pada saat yang sama, ada 3 (tiga) kegiatan, yaitu: mitigasi dan kesiapsiagaan (sebelum), respons (saat), dan pemulihan (setelah). Manajemen bencana ini sangat penting untuk dilakukan. Menurut (Ulum, 2013), manajemen bencana merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi berbagai aspek penanggulangan bencana pada sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana yang dikenal dengan siklus manajemen bencana. Hal ini bertujuan untuk: 1) mencegah kehilangan jiwa; 2) mengurangi penderitaan manusia; 3) memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak yang berwenang mengenai risiko, serta 4) mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis.

Dalam penanggulangan bencana ini peran pemerintah sangat dibutuhkan baik sebelum, saat dan sesudah bencana itu terjadi karena pemerintah khususnya

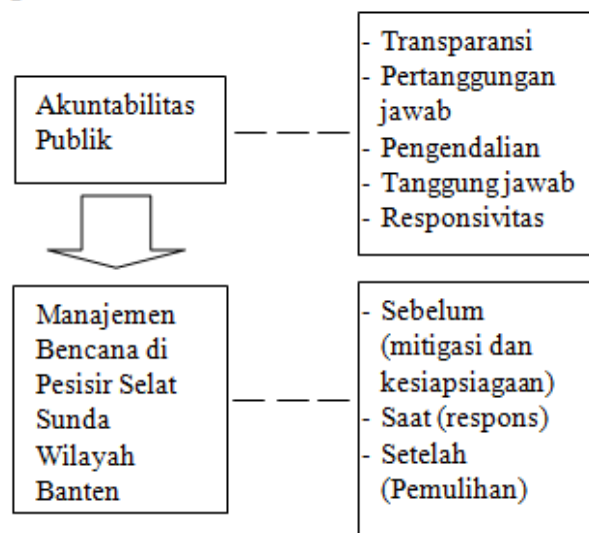
pemerintah daerah Banten bertanggungjawab akan hal tersebut. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, dari sini akan diperlihatkan akuntabilitas pemerintah terhadap publik khususnya di wilayah Banten yang berdampak tsunami Selat Sunda.

Bahwa Konsep *good governance* dimana terdapat 3 (tiga) pilar didalamnya yaitu pemerintah, *civil society* dan swasta harus benar-benar bekerja. Hal ini mencerminkan bahwa harus ada pertanggungjawaban (akuntabilitas) dari pemerintah yang harus lebih aktif lagi untuk membuat dan mengaplikasikan suatu regulasi dimana ketiga pilar tersebut dapat bekerjasama untuk menciptakan kepemimpinan yang baik (*good governance*). Artinya, hal ini dipaparkan oleh (S, 2015) bahwa, tidak hanya secara legal-formal melalui peratifikasian agenda global dalam manajemen risiko bencana, tetapi juga hingga secara domestik

mempraktikkannya melalui program berskala besar seperti Desa Tangguh Bencana (DTB) dan Kampung Siaga Bencana (KSB). Inovasi Kebijakan melalui program Desa dan Kampung siaga bencana merupakan bagian penting dari kebijakan publik. (Sururi, 2016). Hal ini tidak mungkin hanya pemerintah sendiri yang dapat melakukan pekerjaan tersebut karena tanggungjawab pemerintah yaitu dapat menyatukan ketiga pilar tersebut agar dapat berjalan secara bersinergi.

Akuntabilitas yang akan dikaji dari beberapa dimensi yaitu transparansi, pertanggung jawaban, pengendalian, tanggung jawab dan responsivitas. Dimensi tersebut akan dikupas berdasar waktu, peristiwa bencana tsunami Selat Sunda khususnya yang berdampak di pesisir sepanjang wilayah Provinsi Banten. Kerangka konseptual ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. Kerangka konseptual



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2019

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas pemerintah daerah Provinsi Banten dalam manajemen bencana tsunami yang terjadi di Selat Sunda dimana hal ini berdampak pada pesisir wilayah Banten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber

data yang dipakai adalah data sekunder yang didapat melalui penelusuran survei literatur akademisi yang relevan pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu dengan cara penelusuran literatur dari berbagai sumber seperti dokumen pemerintah, media elektronik, jurnal dan buku. Data-data yang didapat kemudian dideskripsikan dalam bentuk narasi yang kemudian dianalisis

Vol.5, No.2, 2019
Doi: <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.22563>
<http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/index>

berdasarkan teori dan konsep *good governance* dan manajemen bencana yang selanjutnya dilakukan proses intepretasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transparansi

Begitu banyaknya korban yang berdampak dari bencana tsunami selat sunda khususnya di sepanjang pesisir Banten menimbulkan berbagai spekulasi di masyatakat. Dimana pemerintah sebelum terjadinya tsunami? Yang seharusnya ada peringatan atau pemberitahuan terlebih dahulu sebelum terjadinya bencana tsunami karena masyarakat tahu bahwa ada alat pendeteksi sebelum terjadinya bencana tersebut. Memang bencana bukan kuasa manusia untuk dapat menentukan kapan waktunya namun usaha preverentif sangat diperlukan sehingga tidak memakan banyak korban. Selain itu, kondisi Gunung Anak Krakatau secara kasat mata telah memperlihatkan tanda-tanda selalu mengeluarkan material dan sering

bergemuruh. Namun, pemerintah sampai pada saat itu belum mengambil tindakan sampai pada akhirnya terjadi tsunami.

Kacaunya situasi dan kondisi di sepanjang pesisir Banten yang berdampak Tsunami Selat sunda membuat ketakutan di masyarakat. Kejadian tersebut banyak masyarakat yang terluka, meninggal dunia bahkan hilang dimakan air laut yang menyapu pesisir pantai dan ini juga hilangnya mata pencaharian warga sebagai nelayan karena perlengkapan dan perahu mereka hampir seluruhnya rusak dan tidak sedikit yang hilang. Evakuasi pun dilakukan secepat mungkin agar para korban dapat tertangani dengan baik. Salah satunya yaitu korban yang meninggal dunia. Tetapi realitas di lapangan sungguh tragis mengisahkan kejadian yang di luar batas dimana hal ini dilakukan oleh oknum tenaga rumah sakit yang memungut (pungutan liar) sejumlah uang kepada pihak keluarga korban yang akan mengambil jenazah. Berikut gambar kuitansi pengurusan jenazah korban tsunami selat sunda:

Gambar 3. Kuitansi Pungutan Liar Pengurusan Jenazah Korban Tsunami Selat Sunda

RUMAH SAKIT UMUM
INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK
DAN MEDIKOLEGAL

No. KWITANSI : 0162

BUKTI PEMBAYARAN TERAKHIR

Sudah Terima Dari : Tn. Leo Mamulang

Alamat : Jakarta

No. Telp. : [Redacted]

Banyaknya : Tiga juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran :
- Pemulsaaran Jenazah
Formalin
Mobil Jenazah

DOK. ISTIMEWADETIK.COM

Sumber : BBC News Indonesia, 2018

Pada kuitansi tersebut tertera bahwa besarnya pungutan liar perjenazah yaitu sebesar Rp 3.900.000,- dimana uang tersebut untuk pembayaran pemulasaraan jenazah, formalin dan mobil jenazah. Masalahnya memang disini masyarakat tidak tahu mengenai pengurusan korban bencana yang meninggal dunia dan biaya pelayanan kesehatan adalah gratis, artinya ditanggung oleh pemerintah. Pada kesempatan yang sama pula, pemerintah kurang transparan terkait sosialisasi peraturan ini sehingga menimbulkan keresahan dan masyarakat dibohongi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal justru korban yang berdampak bencana tersebut diberi santunan duka cita oleh pemerintah kepada ahli waris korban yaitu sebesar Rp 15.000.000,- dimana hal ini diatur di dalam regulasi Undang-undang No. 24 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008.

Kejadian bencana memang menimbulkan polemik baik dikalangan pemerintah maupun masyarakat khususnya terkait anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana. Pasca terjadinya bencana memperlihatkan bahwa terkurasnya anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD untuk penanganan pasca bencana. Pemerintah selama ini mengeluarkan anggaran bencana dari pos belanja lain-lain dengan nilai mencapai Rp67,2 triliun pada tahun ini atau meningkat 34,66 persen dari APBN Perubahan 2017 sebesar Rp49,9 triliun. Padahal, hal ini bisa disiasati di awal perencanaan anggaran untuk tahun selanjutnya untuk usaha mitigas sehingga

tidak menghabiskan anggaran yang ada dari pos yang lain. Hal ini mengungkapkan fakta bahwa kecilnya anggaran untuk lembaga yang berkaitan dengan mitigasi bencana, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Anggaran mitigasi yang minim seringkali disebut menjadi penyebab kurangnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Naiknya anggaran penanganan pascabencana karena banyaknya kejadian tidak dibarengi dengan meningkatnya anggaran untuk lembaga yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana (Beritagar.id). Padahal usaha “sedia payung sebelum hujan” sangat penting untuk direalisasikan. Artinya jika hal ini tidak dilakukan maka akan timbulnya “sakit” yang membutuhkan pengobatan yang mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Kurang optimalnya dalam manajemen keuangan untuk bencana alam telah memperlihatkan bahwa pasca bencana tersebut lebih banyak anggaran yang terkuras yang didapat dari alokasi lain. Ditambah lagi anggaran yang memang dialokasikan untuk bencana tetapi di korupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tidak adanya transparansi dalam penggunaan anggaran membuat peluang tindakan korupsi itu terus mengakar. Korupsi bencana ini salah satunya terjadi dalam proyek pembangunan shelter (tempat penampungan korban) tsunami di Pandeglang senilai Rp 18 miliar dari anggaran APBN 2014 yang menyeret 3 (tiga) orang terpidana yaitu 2 (dua) tersangka Direktur PT Tidar Sejahtera dan

Vol.5, No.2, 2019
Doi: <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.22563>
<http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/index>

PPK dari Kementerian Pekerjaan Umum. Padahal, shelter itu dibuat untuk meminimalisasi dan evakuasi korban tsunami yang sebenarnya belum rampung diselesaikan dimana pada saat ini gedung shelter tersebut mangkrak dan kumuh serta kerap jadi tempat mesum.

Pertanggung jawaban

Berbicara mengenai ketidakmampuan pemerintah untuk memfasilitasi alat pendeteksi gempa dan tsunami serta kurang diberikannya pendidikan dan pelatihan sebelum, saat dan setelah terjadinya bencana kepada masyarakat dan lain-lain membuat bencana ini berdampak sangat luas. Tidak hanya banyaknya bangunan yang rusak bahkan sampai tidak berwujud, terdapat sejumlah korban bencana tsunami yang luka baik luka ringan sampai pada luka berat atau bahkan terdapat korban yang meninggal dunia sampai hilang dan pastinya traumatik yang dialami oleh para korban dimana hal ini butuh waktu yang cukup lama untuk dapat normal kembali. Sebelum terjadinya tsunami dimana pemerintah sangat tidak peduli terhadap penemuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim peneliti terkait bencana tsunami yang kemungkinan besar akan terulang kembali dan di sisi lain kurang diberikannya pendidikan dan pelatihan dalam menghadapi bencana kepada masyarakat, hal ini membuat keadaan dimana masyarakat tidak tanggap terhadap bencana yang akan terjadi dikemudian hari. Gugup, gagap, dan tidak paham apa yang harus dilakukan sebelum, saat dan setelah

bencana itu terjadi, ketakutan, kecemasan tidak hanya pemerintah yang merasakan tetapi hampir seluruh masyarakat merasakan hal yang sama tetapi pemerintah seakan menyembunyikan keadaan tersebut. Dengan terjadinya bencana tsunami selat sunda pada tanggal 22 Desember 2018 yang lalu, pemerintah memikul konsekuensi seperti berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sampai pada terkurasnya anggaran yang seharusnya tidak sebesar apa yang sudah dikeluarkan setelah bencana itu terjadi.

Jika sudah terlanjur seperti ini maka pemerintah harus berusaha keras untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah dengan cara meningkatkan kinerjanya dengan baik dan melakukan berbagai inovasi kebijakan yang mendorong terwujudnya gagasan dan ide dari pejabat publik sebagai entry point diimplementasikannya berbagai program dan kebijakan (Sururi, 2018).

Sebenarnya pada bulan Agustus 2018, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meluncurkan 3 (tiga) produk inovasi tersebut diantaranya yaitu *Tsunami Early Warning System* (Inatews) 4.0 untuk mendukung keselamatan dari ancaman gempa bumi dan tsunami dan info BMKG 4.0 yang memberikan layanan informasi cuaca dan iklim secara lebih presisi dan akurat (BMKG.co.id). Tetapi jika melihat realitas yang ada dengan adanya bencana tsunami selat sunda pada akhir tahun 2018 dimana tidak adanya peringatan dini sebelum terjadinya bencana, peluncuran inovasi

Vol.5, No.2, 2019
Doi: <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.22563>
<http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/index>

yang sudah dilakukan pada bulan Agustus tersebut dipertanyakan.

Pengendalian

Salah satu persoalan yang ada di Indonesia khususnya di Banten adalah tidak lengkapnya catatan *history* bencana yang terjadi dari dulu sampai saat ini yang dapat dijadikan acuan untuk memproyeksikan bencana dikemudian hari. Hal ini bermanfaat bagi pemerintah pusat maupun daerah sebagai bahan untuk dibuatkannya suatu kebijakan mengenai menanggulangi bencana. Hal ini terdapat di dalam proses kebijakan publik dimana didalamnya terdapat perumusan masalah yang sebelumnya dilakukan terlebih dahulu kegiatan *forecasting*. Pada kegiatan itu salah satunya ada yang dinamakan proyeksi. Menurut Subarsono (2016:38), proyeksi merupakan ramalan yang didasarkan pada eksplorasi berdasarkan kecenderungan masa lalu dengan asumsi bahwa masa yang akan datang memiliki pola yang sama dengan masa lalu. Artinya, perlu adanya catatan masa lalu mengenai bencana tsunami yang berhubungan dengan terjadinya erupsi Gunung Krakatau. Hal ini sangat kontras dengan dengan negara maju seperti negara Jepang yang memiliki catatan lengkap akan hal ini sehingga dapat memproyeksikan bencana yang terjadi di masa depan.

Selain kurangnya catatan *history* terkait tsunami dan gempa masa lampau sampai saat ini yang diakibatkan oleh faktor erupsi gunung api (Gunung Krakatau) yaitu Indonesia sama sekali tidak memiliki alat pendeteksi tsunami yang

diakibatkan erupsi gunung api baik yang muncul di permukaan maupun di bawah laut (BBC News Indonesia). Padahal alat pendeteksi tsunami ini sangat penting. Tidak hanya secara kuantitas tetapi juga secara kualitas. Hal ini dikarenakan, terdapatnya alat pendeteksi tsunami yang dinamakan Buoy walaupun jumlahnya di bawah standar ditambah lagi tidak berfungsi (rusak) bahkan hilang. Artinya, alat pendeteksi yang ada tidak berbunyi pada saat tsunami datang yang mengakibatkan masyarakat yang berdampak tsunami tidak sedikit.

Tsunami yang terjadi khususnya di sepanjang pesisir Banten pada tanggal 22 Desember 2018 mengisahkan kesedihan yang mendalam, tidak hanya bagi para korban tetapi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Setelah terjadinya tsunami cukup banyak petugas, baik petugas medis maupun petugas untuk mengevakuasi korban serta relawan yang terus berdatangan. Minimnya pengendalian yang dilakukan pemerintah terlihat juga setelah tsunami itu terjadi. Masih menyimpan traumatik bagi korban serta kepanikan bagi petugas dan relawan di tempat kejadian, terdengar alarm sirine tsunami Anyer dimana pusat suara berasal dari sirine tsunami di Teluk Labuan Kabupaten Pandeglang pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu siang yang menandakan itu adalah peringatan akan adanya tsunami susulan. Tetapi hal ini justru sebaliknya tidak terjadi apa yang ditakutkan. Bunyi sirine tersebut dikarenakan kesalahan teknis dimana pihak BMKG tidak merasa membunyikan sirine peringatan tsunami

Vol.5, No.2, 2019
Doi: <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.22563>
<http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/index>

susulan padahal masyarakat sudah berhamburan mencari tempat perlindungan (shelter) karena mendengar bunyi sirine pertanda adanya tsunami susulan (JawaPos.com).

Evaluasi dari kejadian yang sudah terlanjur memakan banyak korban dan melihat berbagai kemungkinan kejadian kedepan untuk menanggulangi adanya bencana alam antar lembaga perlu adanya usaha mitigasi bencana. Antarlembaga tersebut meliputi BMKG, Badan Informasi Geospasial (BIG), BPPT, dan Kemenkomaritim berencana akan memanfaatkan 3 (tiga) pulau yang mengelilingi Gunung Anak Krakatau yaitu Pulau Krakatoa, Pulau Krakatau Kecil, dan Pulau Sertung. Rencana kedepan akan memasang Tidegauge di 3 (tiga) pulau tersebut untuk mengetahui tsunami lebih dini selain itu alat ini dapat memverifikasi apakah tsunami akan terjadi di wilayah Gunung Anak Krakatau atau tidak. selain itu, Kemenkomaritim akan bekerjasama dengan BPPT untuk pemasangan sensor bawah laut sebagai pengganti Buoy karena kita ketahui bahwa alat Buoy sudah tidak efektif karena sudah banyak yang rusak dan hilang dan tidak berfungsi dengan optimal (Kompas.com. 25 Oktober 2018)

Tanggung jawab

Kejadian bencana tsunami selat sunda menjadi perbincangan hangat, baik dikalangan elit pemerintah sampai pada kalangan masyarakat. Bukan tanpa alasan, hal ini diperlihatkan oleh pihak institusi yang bertanggung jawab akan kejadian ini seakan saling melempar batu sembunyi

tangan. Artinya antarinstansi pun seperti BMKG, BVMGB, BNPB lempar tanggung jawab dan kejadian tsunami selat sunda merasa bukan tanggung jawabnya. Hal ini terlihat jelas bahwa pemerintah tidak serius dalam menangani tsunami dan tidak menempatkan orang yang tepat dalam bidangnya karena kurang mengetahui apa tugas dan tanggung jawab mereka terhadap jabatannya yang diemban.

Aktualiasi prinsip *the right man and the right place* disini sangat penting khususnya pada konteks pemerintah dalam manajemen bencana. Artinya, jika salah satu prinsip ini diimplementasikan dengan baik maka mereka yang berkepetingan dalam penanggulangan bencana ini dapat bekerja dengan optimal salah satunya untuk dapat menjalani regulasi mengenai penanggulangan bencana alam seperti Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Mulai dari usaha preverentif, represif sampai pada usaha kuratif.

Berbagai regulasi yang ada kurang terimplementasikan dengan baik. Seperti pada usaha preverentif yaitu upaya mitigasi disini kurang adanya upaya bagaimana pendidikan dan simulasi cara mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Hal ini bisa saja dilakukan mulai dari usia sekolah dan para pihak swasta serta pemerintah. Hal ini sangat penting mengingat bahwa Negara Indonesia sangat rawan bencana. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008

Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di dalamnya termuat bahwa pemerintah harus tanggap terhadap keadaan darurat yang berkaitan dengan penanganan dampak buruk yang ditimbulkan meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana yang termuat dalam. Pada usaha represif ini, pemerintah belum dapat memperlihatkan kinerjanya dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan lambatnya pemerintah dalam memberikan informasi dimana pemerintah membantah bahwa akan terjadi tsunami, padahal warga setempat di lokasi kejadian yakin bahwa ini adalah bencana tsunami. Kemudian setelah beberapa jam kemudian, pihak pemerintah baru memberikan informasi bahwa bencana tersebut benar adanya yaitu bencana tsunami yang diakibatkan oleh terjadinya erupsi Gunung Anak Krakatau. Keterlambatan ini membuat masyarakat menyimpulkan bahwa pemerintah tidak kredibel dalam menjalankan tugasnya. Terakhir adalah usaha kuratif dimana sudah ada di dalam regulasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdapat salah satu point penting pada penanggulangan setelah bencana itu terjadi yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini dimana pemerintah akan merelokasi permukiman di sepanjang pesisir khususnya yang rawan terdampak tsunami di pesisir Anyer sampai ke Sumur, Pandeglang. Tetapi pemerintah terlebih

dahulu memprioritaskan pada bangunan yang hancur akibat tsunami (Detiknews.com)

Responsivitas

Bahaya tsunami selat sunda sebelumnya sudah diprediksi dari jauh hari oleh berbagai tim peneliti. Namun kemampuan pemerintah untuk merespon terkait hal ini sangat lemah. Seharusnya pemerintah bisa menggunakan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh berbagai tim peneliti sebagai dasar pengambilan kebijakan baik di pusat maupun di daerah sehingga baik pemerintah maupun masyarakat mampu melakukan usaha preventif sebelum bahaya bencana itu terjadi dan tidak menimbulkan lebih banyak korban dan pemerintah tidak gagap dalam menghadapi bencana. Hal ini sebaliknya justru pemerintah mendiskreditkan hasil penelitian tersebut. Padahal penelitian dilakukan bukan dengan tanpa teori dan dasar yang digunakan sehingga kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi kapanpun dan bisa dibuat kebijakan yang tepat untuk dapat menaggulangi bencana yang akan terjadi. Salah satu jurnal yang membahas terkait kemungkinan akan terjadinya bahaya bencana tsunami selat sunda diterbitkan pada tahun 2012 yang berjudul *Tsunami hazard related to a flank collapse of Anak Krakatau Volcano, Sunda Strait, Indonesia* (BBC News Indonesia). Padahal jika kita melihat kepada negara-negara maju seperti Jepang yang sangat merespon baik hasil kajian atau penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti yang

kemudian dijadikan sebagai dasar dibuatkannya kebijakan untuk kepentingan publik.

“Nasi terlanjut sudah menjadi bubur.” Tsunami hampir membersihkan bangunan dan warga di sepanjang pesisir selat sunda. Mau tidak mau, pemerintah harus menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit untuk merespon bencana tersebut. Anggaran yang disalurkan tidak hanya berasal dari anggaran yang sudah di alokasikan untuk bencana tetapi anggaran bersal dari anggaran lainnya. Seperti program kegiatan yang ada di Kementerian Sosial RI pada saat kejadian bencana ini Kemensos melakukan penanggulangan bencana dengan sistem Klaster Nasional yang dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Fokus Kemensos disini adalah evakuasi pengungsi ke tempat aman, serta kelompok rentan yang terdiri atas lansia, anak-anak, penyandang difabel, dan kelompok khusus lainnya. Sedangkan pada pasca tsunami selat sunda, Kemensos melakukan pengerahan personil Taruna Siaga Bencana (Tagana), Kampung Siaga Bencana (KSB), Kendaraan Siaga Bencana, barang persediaan, alat evakuasi,

dan alat sistem komunikasi. Selain itu, untuk mempercepat penanganan korban bencana alam, Kemensos bekerja sama dengan empat lembaga PBB, 12 NGO Internasional, dan lebih dari 100 NGO (Kompas.com).

SIMPULAN

Penerapan *good governace* diantara unsurnya yaitu akuntabilitas di tingkat Provinsi Banten sangat penting salah satunya mengenai manajemen bencana. Mengingat bahwa Indonesia termasuk Banten beresiko terkena bencana alam yang telah terjadi juga bencana selat sunda pada akhir tahun 2018 yang banyak memakan korban. Namun manajemen bencana ini tidak berjalan dengan sesuai harapan sehingga hal ini mencerminkan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat tidak baik. Manajemen bencana tidak hanya saat dan pasca bencana itu terjadi tetapi sebelum bencana terjadi pun butuh perhatian, kajian, dan kebijakan yang matang. Hal ini bukan tanpa alasan yaitu untuk mengurangi korban bencana dan dapat menanggulangi bencana alam secara preventif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aman, A., Al-shbail, T. A., & Mohammed, Z. (2013). Enhancing public organizations accountability through E-Government systems. *International Journal of Conceptions on Management and Social Sciences*, 1(1), 15–21.
- Asrini. (2017). Pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja skpd di pemerintah daerah kota palu. *Katalogis*, 5(1), 52–58.
- Henry, N. (2006). *Public Administration and Public Affairs*.
- Istianti, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kurniawati, C. P. (2015). Kajian Permasalahan Kebijakan Penetapan Status Bencana,

- Kelembagaan BPBD dan Pengelolaan Bantuan Pasca terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2007. *Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1(1), 95–106.
- Moe, T. L., & Pathranarakul, P. (2006). An integrated approach to natural disaster management Public project management and its critical. *Disaster Prevention Adn Management I*, 5(3), 396–414. <https://doi.org/10.1108/09653560610669882>
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Gramedia
- Nur, A. M. (2010). Gempa Bumi, Tsunami dan Mitigasinya. *Geografi*, 7(1).
- Riawati, N. (2015). Potensi Korupsi dalam Kebijakan Publik Studi Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur. *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 19(November), 154–168.
- S, M. B. (2015). Kampung Siaga Bencana Sebagai Instrumen Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Indonesia: Politik Pembangunan dan Partisipasi Dalam Diskursus Pembangunan Kebencanaan. *Sosio Konsepsia*, 5(01).
- Sa'adah, B. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui e-Government. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(2), 1–10.
- Sururi, A. (2016). Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris). *Sawala*, 4(3), 1–14.
- Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sururi, A. (2018). Collaborative Governance Sebagai Inovasi Kebijakan Strategis (Studi Revitalisasi Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama). *Humanika*, 25(1). <https://doi.org/10.14710/humanika.v25i1.18482>
- Ulum, M. C. (2013). Governance dan Capacity Building dalam Manajemen Bencana Banjir di Indonesia. *Jurnal Penanggulangan Bencana*, 4(2), 5–12.
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (per 27 Desember 2018) UU RI Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Alinea.id. 31 Desember 2018. Catatan Korupsi Dana Bencana di Banten. <https://www.alinea.id/nasional/catatankorupsi-dana-bencana-di-banten-b1UBR9gwA>. diakses pada 28 Januari 2019
- BBC News Indonesia. 25 Desember 2018. *Tsunami Selat Sunda Mengapa Tidak Terprediksi?* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46674630> diakses tanggal 21 Januari 2019
- _____ 31 Desember 2018. *Pungli Pengurusan Jenazah Korban Tsunami Selat Sunda: "Baru Kali Ini Terjadi."* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46719167>. Diakses tanggal 22 Januari 2019
- Beritagar.id. 26 Desember 2018. *Minimnya Anggaran Mitigasi Bencana Disorot Setelah Tsunami*. <https://beritagar.id/artikel/berita/minimnya-anggaran-mitigasi-bencana-disorot-setelah-tsunami>. diakses pada 24 Januari 2019
- Bmkg.co.id. 3 Agustus 2018. *Perkuat Sistem Peringatan Dini, BMKG Luncurkan Inovasi Teknologi 4.0 Diresmikan Wapres Jusuf Kalla*. <https://www.bmkg.go.id/berita/?p=perkuat-sistem-peringatan-dini-bmkg-luncurkan-inovasi-teknologi-4-0-diresmikan-wapres-jusuf-kalla&lang=ID>. Diakses pada 25 Januari 2019
- Detiknews.com. 26 Desember 2018. *Pemerintah Akan Relokasi Pemukiman di Pandeglang Yang Kena Tsunami*. <https://news.detik.com/berita/4359420/pemerintah-akan-relokasi-pemukiman-di-pandeglang-yang>

Vol..5, No.2, 2019
Doi: <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.22563>
<http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/index>

- kena-tsunami. diakses pada 24 Januari 2019
JawaPost.com. 23 Desember 2018. *Misteri Alarm Sirine Tsunami Anyer di Minggu Siang, Ini Jawaban Sutopo*.
www.jawapos.com/nasional/humaniora/23/12/2018/misteri-alarm-sirine-tsunami-anyer-di-minggu-siang-ini-jawaban-sutopo%3famp=1 diakses pada 21 Januari 2019
- Kompas.com. 25 Oktober 2018. *BNPB: Selama 2018 ada 1.999 Kejadian Bencana*. <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/25/22572321/bnpb-selama-2018-ada-1999-kejadian-bencana>. diakses tanggal 8 Januari 2019
- _____. 24 Desember 2018. *Pasca Tsunami Selat Sunda, Begini Rencana Pemerintah Terkait Mitigasi*. <https://sains.kompas.com/read/2018/12/24/201835523/pasca-tsunami-selat-sunda-begini-rencana-pemerintah-terkait-mitigasi>. diakses pada 24 Januari 2019
- _____. 31 Desember 2018. *Ini Upaya Kemensos Dalam Penanganan Bencana Tsunami Selat Sunda*. <https://regional.kompas.com/read/2018/12/31/16344551/ini-upaya-kemensos-dalam-penanganan-bencana-tsunami-selat-sunda>. diakses pada 24 Januari 2019
- Tempo.co. 3 Januari 2019. *BNPB: 429 Korban Tewas Tsunami Selat Sunda Sudah Teridentifikasi*. <https://nasional.tempo.co/read/1161045/bnpb-429-korban-tewas-tsunami-selat-sunda-sudah-teridentifikasi/full&view=ok> diakses tanggal 8 Januari 2019